

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdulssalam, R., (1997), *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta: Gagas Mitracatur Gemilang.

Amrani, H., (2015), *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Arief, B.N., (2010), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta,

_____, (2010), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Atmasasmita, R., (2000), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Putra Abardin

_____, (2000), *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

_____, (2004), *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

_____, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Bakhri, S., (2009), *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.

Bassioumi, M. Cgerif (Editor), (1986), *International Criminal Law*, New York, Transnasional Publisher Inc., (Volume I).

Fuady, M., (1996), *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

_____, (2001), *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

_____, (2004), *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keras Putih*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

_____, (2006), *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.

- Harahap, M.Y., (2003), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, (2005), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiana, Y., (2015), *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafia Media.
- Kusumaatmadja, M., (1976), *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Lamintang, PAF, (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, PAF, dan Samosir, D., (1995), *Detik-detik Khusus*. Bandung: Transito
- Mefford, A., (1997), *Lex Informatica: Foundations of Law on the Internet*, Indiana Journal of Global Legal Studies: Vol. 5.
- Mahfud MD., M., (2012), *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mohamad, A., (2007), *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Sebuah Keharusan*. Jakarta.
- Moeljanto, (1993), *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. dan Muniarti, R., (2000), *Segi Hukum Lembaga keuangan Dan Perbankan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, (2010), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurdin, B., (2012), *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Nurdin, B., (2017), *Thinking Paradigm of Judges for Law Enforcement in Indonesi: from Positivism to Realism*, 6th Annual International Conference on Law, Regulations and Public Policy (LRPP).
- Pardede, M., (1995), *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Parthiana, I W., (1976), *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Bina Cipta

- _____, (2004), *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widia
- _____, (2005), *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widia.
- Purnomo, B., dalam S. Arianto, (2011), *Memahami Hukum* (Jakarta: Rajawali Press.
- Rahardjo, S., (Tanpa Tahun), *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Reksodipoetro, M., (1993), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____, (1994), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, (dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana).
- Richaman, D.C., and Stuntz, W.J., (2005), *Al Capone's Revenge: An Essay on the Political Economy of Pre-textual Prosecution*, Columbia Law Review.
- Riswandi, B.A., (2005), *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salman, O.S. dan Susanto, A.F., (2004), *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung:Refika Aditama.
- Schroth, P.W., (1994), 'Bank Confidentiality and the War on Money Laundering in the United States', the American Journal of Comparative Law.
- Seagrave, S. (1995), *Lords of The Rim: The Invisible Empire of the Overseas China*. Putnam.
- Shams, H., (2004), *Legal Globalization: Money Laundering Law and Other Cases*. London: British Institute of International and Comparative Law.
- Siahaan, NHT., (2005), *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sjahdeni, (2007), *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti.

Soekanto, S., (1986), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

_____, (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Suyatno, T., (1999), *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

Sudarsono, (2009), *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarsono, (2009), *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Susanto, A. F., (2004), *Wajah Peradilan Lita : Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akutabilitas Peradilan Pidana* Bandung: Refika Aditama.

Tunggal, A.W., (2014), *Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering Prevention)*. Jakarta: Harvarindo.

Weaver, S.J., (2005), 'Modern Day Money Laundering: Does the Solution Exist in An Expansive Syste, of Monitoring and Record Keeping Regulation?', *Annual Review of Banking & Financial Law*.

Widnyana, I M., (2012), *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Ubhara Press

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Penjelasan Umum UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sumber-Sumber Lain :

Sudarmadji. Makalah yang berjudul “*Esensi dan Cakupan UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*”, disampaikan pada Seminar Nasional Sosialisasi UU No.25 Tahun 2003 Kerjasama Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Unsri dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel, tanggal 15 Juli 2003.

Tim Bank Indonesia. Makalah yang berjudul: “*Peranan Bank Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Era Globalisasi, di Bandung, 23 Juni 2007.

http://blackapril.tripod.com/menyoal_cyberlaw_di_indonesia.htm pada tanggal 12 Agustus 2017

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), Jakarta: Balai Pustaka.
Longman Dictionary of English Language and Culture (1992), England: British Publisher

